

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019
DI GAMPONG ALUE SEURALEN KECAMATAN
WOYLA TIMUR KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

OLEH

RESI AYU SANTIA
1705905010006



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Telp : (0655) 7001959

Laman : www.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 14 Juli 2021

Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

**Nama : RESI AYU SANTIA
NIM : 1705905010006**

Dengan Judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2019 DI GAMPONG ALUE SEURALEN
KECAMATAN WOYLA TIMUR KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

Sri Wahyu Handayani, M.A.
NIDN.0023029001

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri, S.H., M.H.
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Endhi Ilhamyali, S.IP., M.Si.
NIDN.0017109108



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Telp : (0655) 7001959

Laman : www.utu.ac.id, Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 14 Juli 2021

Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

**Nama : RESI AYU SANTIA
NIM : 1705905010006**

Dengan Judul:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2019 DI GAMPONG ALUE SEURALEN
KECAMATAN WOYLA TIMUR KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 14 Juli 2021

Menyetujui

Komisi ujian

1. Ketua : Sri Wahyun Handayani, M.A
2. Anggota : Nedi marefanda, M.AP
3. Anggota : Veni Nella Syahputri, M.Pd

Tanda tangan



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESI AYU SANTIA

NIM : 1705905010006

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lainnya yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, saya menyatakan kesediaan untuk di batalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 14 Juli 2021

Saya yang membuat pernyataan,



RESI AYU SANTIA
1705905010006



PERSEMBAHAN



Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta) ditambahkan kepadanya tuju laut (lagi) sesudah (kering)nya niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. Lukman: 27)

Ya Allah...

Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakanlah kami dengan ketekunan dan hiasilah diri kami dengan kesabaran, sesungguhnya Allah tidak akan menguji seseorang hamba di luar batas kemampuannya dan mintak pertolongan'nya dengan shalat dan sabar.

Alhamdulillah...

*Dengan ridho mu ya Allah
Tahap ini telah kuselesaikan,
Namun ini bukan akhir dari perjalanan ku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju tahap selanjutnya.*

Teruntuk orang-orang tercinta

Ayahanda (M. Yusuf, FD) dan Ibunda Tercinta (Lisniati) serta Abang (Dedi Sufrijal Listiwa) dan Adekku (Mila Zaskia, Noza Rizki Maulana Fadli, kemudian Saudara saudaraku (Hasballah, Manicah, M. Tahir, Wahyu Saputra S. Sos, Maya Suriani, masyita)

Terimakasih banyak atas segala bentuk motivasi yang menghiasi isi hati dan pikiran, sehingga menjadikan peribadi ini menjadi sesuatu yang sedikit berkembang. setiap langkah, setiap keringat dan air mata yang menetes, dan apa pun itu akan kupersembahkan semuanya untuk orang2 yang tercinta.

Persembahan terbaik untuk almarhum Kakek Abdurahman cucu mu akan menjadi manusia yang serba bisa dalam segala hal, I'M promise

Dan beribu terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya (ibu Sri Ayu Handayani, MA) serta dosen penguji (ibu Veni Nella Syahputri, M.Pd) dan (bapak Nodi Marefanda, M.AP) yang telah memberikan saya ilmu yang sangat luar biasa, telah meluangkan waktu hanya demi membimbing saya, dan berkat bantuan beliau lah saya bisa mendapatkan gelar Sarjana, mungkin jasa mereka memang lah tak sanggup terbalas karena Allah lah yang mampu membalas semuanya.

Dan spesialnya kepada sahabat-sahabat saya tercinta (Arisna, Jissilia, Dedek Makfirah, hernijal, Nova Reza, Fera Julita, masrifa, marziana Ulfa, Nuril Aina) yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya hingga dapat menyelesaikan karya ini. Tak terlupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017 FISIP yang telah membantu, tanpa semangat dan dukungan dari kalian semua mungkin saja tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini, kupersembahkan karya kecil ini untuk kalian semua para sahabatku.

Sesungguhnya bersama kesulitan akan kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah kerja keras (untuk urusan yang lain), (Q.S Al-Insyirah: 5-7)

Resi Ayu Santia



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul” **Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat**”, Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada jurusan ADM pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta yang telah mendo’akan dalam setiap sujudnya serta keluarga yang telah memberikan motivasi baik moril maupun material sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Ibu Sri Wahyu Handayani, M.A selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan Proposal Skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Jasman Ma’aruf, SE, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar
4. Bapak Basri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar

5. Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
6. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
7. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani peneliti baik di waktu susah maupun senang.
8. Semua pihak yang tidak biasa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Alue Peunyareng, 14 Juli 2021

Penulis

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the level of community participation in the 2019 development planning process in Gampong Alue Seuralen, East Woyla District, West Aceh Regency and to find out what factors affect the level of community participation in the 2019 development planning process in Gampong Alue Seuralen, East Woyla District, West Aceh Regency. . This study uses a qualitative descriptive method by using observation techniques and direct interviews with respondents who are considered capable of answering and describing divorce problems. Sampling in this study used the maximum variation and in the selection of respondents by purposive sampling, namely selecting informants who are considered to know and can be trusted to be sources of data and to know the research problem in depth. The results of the study indicate that the level of community participation in the 2019 Development Planning process in Gampong Alue Seuralen, East Woyla District, West Aceh Regency has not been effective and maximal. The vision and mission to be achieved in increasing village development is not yet optimal. The analysis of the external conditions of the gampong government has not been supportive in terms of gampong development. Factors that affect the level of community participation in the 2019 development planning process in Gampong Alue Seuralen, East Woyla District, West Aceh Regency, include internal and external factors. Internal constraints in the development planning process in the Alue Seuralen Village are the lack of enthusiasm for participation, awareness, and individual abilities that make them reluctant to criticize and give suggestions to the government of Alue Seuralen Village. External constraints are the presence of irresponsible parties who encourage the community not to participate in various activities and sometimes succeed in influencing the community.

. Keywords: Participation, Development, Gampong Community

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dan mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung kepada responden yang dianggap mampu menjawab dan menjabarkan permasalahan perceraian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan variasi maksimum dan dalam pemilihan responden secara purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data dan mengetahui masalah penelitian secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum secara efektif dan maksimal. Visi dan misi yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan gampong belum optimal. Analisis kondisi eksternal pemerintahan gampong belum mendukung dalam segi pembangunan Gampong. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diantaranya yaitu faktor internal dan eksternal. Kendala internal dalam proses perencanaan pembangunan digampong alue seuralen adalah lemahnya semangat dalam berpartisipasi, kesadaran, maupun kemampuan individu yang dimiliki yang mengakibatkan mereka enggan untuk kritik dan sarannya kepada pihak pemerintahan gampong alue seuralen. Kendala eksternal yaitu adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memngompori masyarakat agar tidak ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan terkadang berhasil mempengaruhi masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat Gampong

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Konsep Pembangunan Gampong.....	10
2.3 Teori Partisipasi	14
2.4 Bentuk Partisipasi	16
2.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Metode Penelitian	22
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	22
3.2.1 Lokasi Penelitian	22
3.2.2 Sumber Data	22
3.2.3 Teknik Penentuan informan	23
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.3 Instrumen Penelitian	23
3.4 Teknik Analisa Data	23
3.5 Uji Kredibilitas Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	26
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	26
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.3 Hasil Penelitian.....	28
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN	45

5.1 Pembahasan Penelitian	45
BAB VI PENUTUP	52
6.1 Kesimpulan	52
6.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Nama-nama Informan Penelitian	24

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar.1 Struktur Organisasi Gampong Alue Seuralen	53
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Sura Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Pengertian partisipasi/peran- serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut-sertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat, dibedakan menjadi lima katagori , yaitu: Partisipasi spontan, Partisipasi terinduksi, Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, Partisipasi tertekan oleh peraturan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pedesaan sangat bergantung pada peran pemerintah *gampong* dan masyarakat *gampong* . Keduanya harus mampu menghasilkan sinergi. Tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah tidak akan bisa mendapatkan hasil pembangunan yang terbaik. Selain membutuhkan pelibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar lebih efektif dari segi pendanaan dan lebih efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan sangat penting, karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua belah pihak dapat memainkan sinergi yang terbaik. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,

mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Ada tiga unsur pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu: Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi, Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Keterlibatan masyarakat *gampong*, merupakan salah satu kunci penting dalam keberhasilan pembangunan gampong baik fisik maupun non fisik. Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang Top Down namun akan menerapkan sistem Bottom Up dimana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan gampong.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Negara yang sedang berkembang sangatlah penting, tetapi faktanya partisipasi masyarakat dalam rangka proses perencanaan pembangunan masih sangatlah lemah, mulai dari aspek

semangat, kesadaran, maupun kemampuan individu. Lemahnya semangat, kesadaran dipengaruhi oleh berbagai masalah, salah satunya keterbatasan yang dimiliki masyarakat, disamping itu lemahnya aspek kepemimpinan dalam suatu daerah dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah inti dari perumusan kebijakan karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan dan orientasi itu sendiri. Perumusan kebijakan senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik. Perencanaan pembangunan senantiasa berbicara tentang apa yang dipilih untuk dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah di suatu daerah. Kebijakan publik merupakan aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana. Yang menjadi fokus pada perumusan kebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah senantiasa dipersembahkan untuk kepentingan publik atau warga Negara yang kita istilahkan sebagai rakyat atau masyarakat.

Partisipasi masyarakat yakni UU No 23 Tahun 2014 Pasal 354. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat maka pemerintah daerah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara aktif ; dan/atau, kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya mendukung suksesnya pembangunan didaerahnya. Sebagai warga Negara yang aktif masyarakat harus selalu tanggap dengan segala perencanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat mesti terlibat dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik, karena idealnya kebijakan dalam suatu Negara demokrasi merupakan aspirasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woya Timur Kabupaten Aceh Barat dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari hasil pemikiran masyarakat berdasarkan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga partisipasinya akan dirasakan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Gampong Alue Seuralen dengan berbagai bantuan untuk menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program perencanaan pembangunan. Pemberian kreativitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Menurut pengamatan peneliti hal diatas belum berjalan secara maksimal. Masyarakat belum dilibatkan dan melibatkan diri secara maksimal dalam proses perencanaan pembangunan yang sesuai dengan UU NO 23 Tahun 2014 Pasal 354 Pada ayat 1 yaitu Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. Realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di

Gampong Alue Seuralen ikut berpartisipasi. Hal ini karena beberapa faktor yang mempengaruhinya yang pertama karena setiap pendapat atau saran yang diberikan oleh masyarakat kurang dianggapi oleh aparat desa hal ini dilihat berdasarkan pembangunan sarana yang di bangun misalnya masyarakat membutuhkan pembangunan sumur boor namun saat realisasi yang di bangun talut atau rabat beton yang bukan dari hasil musyawarah dengan masyarakat desa, maka dari itu masyarakat kadang tidak mau ikut rapat dan walaupun ikut rapat mereka tidak mau berpartisipasi dalam hal pemberian ide karena sia-sia kata-kata salah seorang masyarakat yang tidak mau disebut namanya. (Hasil Observasi awal 2021)

Maka dari itu disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ataupun sebaliknya. Observasi awal peneliti mendapatkan informasi berupa keterangan dari beberapa masyarakat, dimana konsep perumusan kebijakan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, masyarakat hanya cenderung dilibatkan dan melibatkan diri dalam legitimasi agenda kebijakan, namun kurang maksimal pada agenda perumusan dan perencanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang lahir cenderung tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah peneliti jelaskan diatas.

Dampak yang lain adalah rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan serta terkadang bertentangan dengan kemauan masyarakat hal ini dapat menghambat pembangunan daerah yang mengakibatkan suatu daerah tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Maka secara perlahan dapat menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat kepada pihak elit birokrasi, karena cenderung dinilai otokrasi dimana peneliti menghadiri acara musyawarah Rencana Kegiatan Pemerintah

Gampong (RKP Gampong) yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan Gampong Alue Seuralen pada tanggal 11 juli 2019, dari 30 undangan yang disebarkan oleh penyelenggara kegiatan hanya ada 18 orang yang menghadiri kegiatan tersebut, termasuk dengan para Aparatur pemerintahan Gampong itu sendiri.

Maka atas dasar masalah diatas penulis tertarik meneliti topik di atas dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat?
2. Faktor apasaja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

2. Mengetahui Faktor apasaja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penulis

Melalui penelitian ini dapat menambah khazanah berpengetahuan dalam kajian ADM bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan.

b. Lingkungan Akademisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pihak pemerintahan Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh barat dan juga dapat membangkitkan kesadaran jiwa berpartisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi serta sumbangsih pemikiran bgi penelitian yang lain yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan di tingkat pemerintah Gampong.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan

Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Maka dapat diperoleh khususnya bagi peneliti yaitu dapat memperkaya ilmu yang dimiliki. Kemudian untuk pihak terkait dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat agar kelak menjadi masukan yang berarti dalam tata cara pengambilan Kebijakan Pemerintah gampong Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada proses Perencanaan Pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terkait alur penelitian ini, maka penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu sebagai referensi, landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian.

BAB III :Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data serta uji kreadibilitas data.

BAB IV :Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh di lapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V :Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI :Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan sarab dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Aprilia (2018) yang berjudul “Efektivitas penggunaan anggaran Desa Tahun 2017 terhadap pembangunan Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Desa Tahun 2017 terhadap pembangunan Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan efektif karena dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur Gampong diwilayah tersebut sudah cukup maksimal dan tingkat penggunaan anggaran desa di Gampong tersebut sudah terealisasi secara tepat dan sesuai dan dapat dilihat dari Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Penelitian Feiby (2017) dengan judul “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kebijakan Program Dana Desa (DD) di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari kegiatan program Dana Desa berjalan sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban. 2. Perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan Sama-sama mengkaji program Dana Desa.

Persamaan penelitian ini hampir serupa dengan judul penelitian sebelumnya yaitu tentang anggaran pembangunan Desa dan teori yang digunakan.

Perbedaannya adalah hasil yang didapatkan akan berbeda karena pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan melihat sejauh mana tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat”

2.2 Konsep Pembangunan Gampong

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Hal tersebut diatas sesuai dengan yang termuat dalam UU No.6 Tahun 2014.

2.2.1 Pengertian Pembangunan Gampong

Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001 h.132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas

rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Menurut Soetomo (2008 h.16), pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal.

Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan rakyat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis.

Dengan demikian pembangunan diprioritaskan pada bidang ekonomi yang harus didukung oleh ketertiban dengan kapasitas hukum, peningkatan kemampuan dan juga kewibawaan dari pada aparatur negara, pertumbuhan pada kreatifitas dan juga kegairahan kerja, partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban umum, masalah pajak dan pola hidup sederhana.

Taliziduhu Ndraha (2009 h.12) Pembangunan Desa adalah proses dengan mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini

dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan strategi dalam pembangunan daerah yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

2.2.2 Pengertian Gampong

Pemerintah Desa di Aceh disebut *Gampong*. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri. Terdapat 3 unsur pimpinan Gampong yaitu *Keuchik*, *Teungku Meunasah* dan *Tuha Peut*, akan tetapi dalam menjalankan kekuasaan lebur menjadi satu dan dijalankan oleh *Keuchik* (Soerjono Soekanto 2002 h.147).

Gampong dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, blang, padang dan hutan. Dalam arti hukum, gampong merupakan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat territorial. Sedangkan *Kampong* merupakan tempat hunian berbagai belah yang meliputi wilayah tempat hunian, padang, persawahan dan hutan

Gampong bukanlah bawahan Sagoe Cut (Kecamatan), karena Sagoe Cut merupakan bagian dari perangkat daerah Sagoe (Kabupaten) atau Kota, sedangkan Gampong bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Gampong memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas.

Namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (HAW.Widjaja, 2003 h. 3).

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Desa sekarang telah memiliki kewenangan yang cukup besar, Pasal 1 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan ayat 2 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.3 Teori Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000, h. 419).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010, h. 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001, h.201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009, h.287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Sundariningrum dalam Sugiyah (2001 h.38) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk

penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001 h, 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau

pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2.4 Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011, h.58), terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana

masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

2.5 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001, h.124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga

PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005 h.16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007 h.27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Menurut Slamet (2003 h.8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (*political participation*)
2. Partisipasi social (*sosial participation*)
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu

keperdulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipasif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui

diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Partisipasi masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat.

Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan suatu proses untuk menjawab dan mencari pemecahan mengenai suatu permasalahan, dalam mencari pemecahan masalah mengenai penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2012, h.4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati..

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

3.2 Sumber Data dan teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, alasan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan data dan informasi yang didapatkan mudah, karena sistem pemerintahan sudah tertata dengan rapi.

3.2.2 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002, h. 82) data primer ialah data yang diperoleh atau

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain, catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002, h.82) data sekunder adalah data yang diperoleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan, dokumen, internet dan lainnya, yang berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*Key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informasi tersebut maka penulis menggunakan “*purposive sampling*”. Menurut Noor, (2009, h.155) *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dijadikan informan

Berdasarkan *purposive sampling* atau *sampling tujuan* maka yang menjadi informan bagi penulis dalam penelitian ini.

Tabel. 3.1
Nama-nama Informan penelitian

No	Nama nara sumber	Jumlah
1	Keuchik	1 orang
2	Tuha Peut	3 orang
3	Unsur Masyarakat	7 orang
Jumlah		11 Orang

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 11 orang, alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan subjek yang telah ditetapkan ini dianggap mengetahui dan memahami masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta peneliti ingin mengetahui tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah :

Banyak metode yang dapat di gunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Adapun sumber perolehan data dalam penelitian ini adalah :

a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dari pelaku usaha yang akan diteliti dengan melihat dan mengamati secara langsung di tempat yang telah menjadi lokasi penelitian.

b. Pertanyaan (Wawancara)

Merupakan daftar pertanyaan wawancara yang dibuat dengan berisikan serangkaian pertanyaan yang berkenan dengan penulisan penelitian ini. Ditunjukkan kepada seluruh responden yang menjadi sampel yang terdiri dari keseluruhan sampel.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto.

3.3 Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrument kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Penggunaan peneliti sebagai instrument penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan realible.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian data)

Dengan penyajiaan data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion Drawing/Verification (Penerarikan Kesimpulan)

Kesimpulan data penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Alue Seuralen Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukotanya Meulaboh, sebelum pemekaran mempunyai luas wilayah 10.097.04 Km² atau 1.010.466 Ha dan secara astronomi terletak pada 2° - 5°,16 Lintang Utara dan 95°,10° Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Sesudah pemekaran Meulaboh memiliki luas wilayah sebesar 292.795 Ha atau 2.927,95 Km² dan letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara agronomi terletak pada 04°61' - 04°47' Lintang utara dan 95° - 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.442,00Km² bujur sangkar.

Adapun secara administratif, wilayah Kabupaten Aceh Barat berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Naga Raya
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Jaya

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Johan Pahlawan	29.109	28.225	57.334
2	Samatiga	6.891	6.736	13.627
3	Bubon	3.364	3.331	6.695
4	Arongan Lambalhek	5.584	5.268	10.852
5	Woyla	6.167	6.182	12.349
6	Woyla Barat	3.557	3.458	7.015
7	Woyla Timur	2.139	2.094	4.233
8	Kaway XVI	9.801	9.381	19.182
9	Meureubo	13.919	13.197	27.116
10	Pante Ceureumen	4.899	4.957	9.856
11	Panton Reu	2.927	2.874	5.801
12	Sungai Mas	1.750	1.722	3.472
	Jumlah	90.107	87.425	177.532

Sumber : Aceh Barat dalam angka 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan jumlah penduduk yang banyak didominasi pada penduduk Kecamatan Johan Pahlawan. Penduduk yang sedikit penduduknya adalah Kecamatan Sungai Mas.

4.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi Ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Barat adalah mayoritas masyarakat bertani, berladang, berternak, berdagang, buruh kasar dan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang memiliki profesi pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4.1.2 Kondisi Sosial dan Budaya

Kondisi sosial dan Budaya yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang telah dilaksanakan meliputi berbagai macam sektor yang meliputi Pendidikan dan sarana umum lainnya, Saat ini di Kabupaten Aceh Barat sudah tersedia tiga unit rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien (tipe-C), Rumah Sakit Montela (swasta) dan Rumah Sakit TNI-AD yang ketiganya berlokasi di Kota Meulaboh.

Jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Aceh Barat laki-laki 90.107 jiwa, penduduk perempuan 87.425 jiwa dengan jumlah total penduduk Aceh Barat 177.532 jiwa, Jika kita lihat dari tingkat mata pencarian masyarakat Aceh Barat sebagian besar diantaranya adalah petani atau bekerja diperkebunan dan Peternakan hanya sebagian kecil saja yang bekerja di bagian pemerintahan.

4.2. Gambaran Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat

Pada tahun 1954 yang lalu Alue Seuralen dan Rambong Pinto adalah satu buah Gampong yang di namakan Gampong Pantan Jambo Awe yang dipimpin oleh Pang Gampong Keuchik Nyaklah, Pusat pemerintahan Gampong di dusun rambong pinto. Pada tanggal 11 september 1954 M terjadi perselisihan antara masyarakat dusun Rambong Pinto dan dusun Alue Seuralen. perselisihan itu terjadi sampai dengan tanggal 22 September 1954 pada saat itu.

Musyawarah Gampong pada tanggal 05 Oktober 1954 yang d hadiri oleh Raja Woyla

1. TR.husen Syah / Ampon Woyla.
2. Tgk.Muhammad Fakir / Tgk.Kazi / Kuaket.
3. Tekneng / Komondan kepolisian.
4. Pak Patok /Komondan Militer.

5. Tgk.Imum Manafi / Imum Mukim Krung Bhee.
6. Keuchik Nyaklah Pang Gampong Pantan Jambo Awe.
7. Pang Bintang /Tokoh Masyarakat.
8. Pang Surat /Wakil Gamong.
9. Tgk.Sida /Imum meunasah.

Berdasarkan musyawarah tersebut terdapatlah suatu solusi Gampong menjadi dua yaitu Gampong Rambong Pinto dan Gampong Alue Seuralen tepatnya pada tanggal 09 Oktober 1954 Resmi dusun Alue Seuralen menjadi Wilayah Gampong dengan di nobatkan Keuchik pertama Banyen Bin Tgk. Pida menjadi Keuchik Pertama Gampong Alue Seuralen.

Beberapa tahun kemudian perkembangan Gampong semakin meluas,masyarakat membuka hutan untuk menambah kawasan pemukiman.lokasi pemukiman yang berda di lereng pergunungan dan lembah yang subur dan akhirnya kelompok Gampong menetap di kawasan hutan tersebut dan dinobatkan sebagai kepala pemimpin/ keuchik pertama di Gampong Alue seuralen.

Gampong Alue Seuralen terletak lebih kurang (\pm) 57 Km dari pusat kota Meulaboh, dengan Batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan PT Mapoli Raya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Tuwie Empeuk
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Rambong Pinto
4. Sebelah barat berbatasan dengan Rambong Pinto.

Adapun jumlah Penduduk Gampong Alue Seuralen adalah sebanyak 174 Jiwa terdiri dari; Laki-laki sebanyak 82 jiwa dan 92 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 70 Kepala Keluarga.

4.2.1 Visi dan Misi Gampong Alue Seuralen

- VISI

Dengan memperhatikan amanat RPJMG Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Periode tahun 2015-2022 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi pembangunan Pemerintah Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat adalah :

“Meningkatkan Kamandirian Masyarakat”,

(Penjelasan kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya, yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat) Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Pemerintahan Gampong yang Bersih, dan Peningkatan Taraf Kehidupan Masyarakat yang Mapan.

Penjabaran makna Visi Gampong Alue Seuralen dijabarkan dalam Misi Pembangunan Gampong Alue Seuralen

- MISI

Dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara betah Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif, kompeten dan berwibawa, bebas adab masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri “, melalui:

1. Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
2. Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat;
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;
6. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintah Gampong Alue Seuralen ;
7. Menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan usaha sebagai berikut :
 - Memberikan pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Gampong
 - Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
 - Perekonomian mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha penambahan pendapatan keluarga
 - Mencari kesempatan atau peluang untuk membuka lapangan kerja baru
 - Mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat usaha mandiri

4.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab, dan fungsional kepada unit-unit operasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok agar gampong dapat berjalan kearah tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan wadah dari pelaksanaan kegiatan dan mencerminkan atas pendeklarasian wewenang dan tanggung jawab terhadap masing-masing bagian dalam gampong yang disusun dengan pertimbangan yang sempurna dengan menempatkan orang-

orang pada setiap tupoksi yang harus sesuai dengan ketrampilan atau keahlian yang dimiliki sehingga tujuan gampong dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat menyusun struktur organisasi sedemikian rupa sehingga terlihat jelas pembagian tugas dan wewenangnya serta pertanggung jawaban atas tugas yang didelegasikan dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah tugas dan wewenang pekerja yang ada Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

1. Keuchik

Keuchik berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Gampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelaksanaan syariat islam di gampong;
- b. menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, antara lain :
 1. tata pemerintahan;
 2. penetapan peraturan di gampong;
 3. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
 4. pengelola aset gampong;
 5. pembinaan masalah pertanahan;
 6. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

7. upaya perlindungan masyarakat;
 8. administrasi kependudukan;
 9. penataan dan pengelolaan wilayah;
 10. penyusunan profil gampong; dan
 11. pencegahan dan penanggulangan bencana.
- c. Melaksanakan pembangunan di gampong, seperti:
1. pembangunan sarana prasarana gampong;
 2. pembangunan bidang pendidikan; dan
 3. pembangunan bidang kesehatan.
- d. Pembinaan kemasyarakatan, seperti :
1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. peningkatan partisipasi masyarakat;
 3. pelaksanaan gotong royong dan swadaya murni masyarakat;
 4. pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
 5. pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat; dan
 6. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
- e. pemberdayaan masyarakat, seperti :
1. pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan dan kesenian;
 2. usaha peningkatan ekonomi masyarakat;
 3. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
 4. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 5. kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan

6. mengembangkan peran serta organisasi di bidang kepemudaan dan olahraga.
- f. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keuchik memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik gampong;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG;
- d. menetapkan PPKG;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAKG); dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keuchik memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset gampong;
- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/ pengurus aset gampong;
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah-tanganan aset gampong;
- d. menetapkan kebijakan pengamanan aset gampong;
- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset gampong yang bersifat strategis melalui musyawarah gampong;

- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset gampong sesuai batas kewenangan; dan
- g. menyetujui usul pemanfaatan aset gampong selain tanah dan/atau bangunan.

2. Sekretaris Gampong

Sekretaris Gampong berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Gampong. Sekretaris Gampong bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh Keuchik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Gampong mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Keuchik, administrasi penghasilan Perangkat Gampong, administrasi tunjangan Tuha Peut, administrasi keuangan lembaga pemerintahan gampong lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan gampong; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, menginventarisir data-data dalam

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong serta penyusunan Laporan Keuchik.

Sekretaris gampong dalam gampong dalam melaksanakan fungsinya melaksanakan urusan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, bertugas sebagai koordinator PPKG. Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBG;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBG dan rancangan perubahan APBG;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan qanun gampong tentang APBG, perubahan APBG, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan keuchik tentang Penjabaran APBG dan Perubahan Penjabaran APBG;
- e. mengkoordinasikan tugas perangkat gampong lain yang menjalankan tugas PPKG;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan gampong dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBG.
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAKG; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

Dalam hal inventarisasi dan pengadministrasian aset gampong sebagaimana terdapat ayat (3) huruf b, Sekretaris gampong memiliki kewenangan dan tanggungjawab:

- a. meneliti rencana kebutuhan aset gampong;
- b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset gampong;
- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset gampong yang telah disetujui oleh keuchik;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset gampong; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset gampong.

3. Kaur Keuangan

Kepala Urusan keuangan dalam melaksanakan fungsinya melaksanakan urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyusun RAKG; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBG.

4. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. melaksanakan manajemen tata Pemerintahan;
2. menyusun rancangan regulasi di gampong;
3. pembinaan masalah pertanahan;
4. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
6. pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7. penataan dan pengelolaan wilayah;
8. pendataan, penyusunan, dan pendayagunaan Profil Gampong;
9. pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
10. fasilitasi pemilihan keuchik.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik gampong;
- b. pembinaan dan pembangunan di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pembangunan di bidang kesehatan;
- d. pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang seni dan budaya;
- e. pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang ekonomi;
- f. pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kebersihan, keindahan, pertamanan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang politik dan kesatuan bangsa;
- h. pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
- i. pembinaan organisasi di bidang kepemudaan dan olahraga.

6. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi ;

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan peningkatan usaha swadaya murni, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat;
- d. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- e. penyelenggaraan pelayanan perijinan.

7. Ulee Jurong

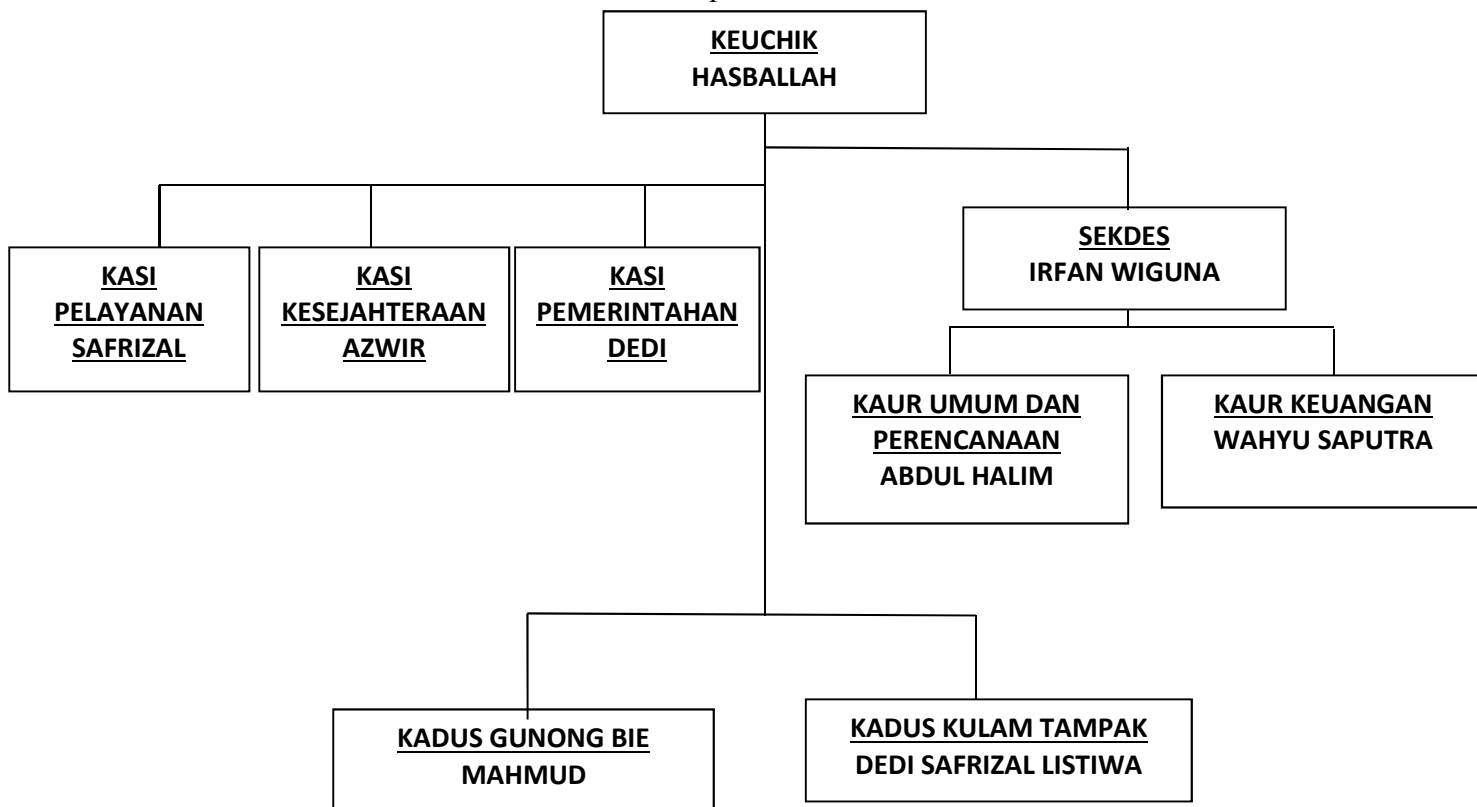
Ulee Jurong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, Ulee Jurong bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan di wilayah Jurong masing-masing serta tugas lain yang diberikan oleh Keuchik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ulee Jurong memiliki fungsi :

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan mobilitas kependudukan;
- c. penataan dan pengelolaan wilayah;
- d. pembinaan dan pendataan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- f. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, dan pencegahan dan penanggulangan bencana;

melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Struktur Pemerintahan Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur
Kabupaten Aceh Barat



4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat

Pembangunan Gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan dalam pembangunan gampong ada beberapa tahap yang harus dilalui diantaranya adalah sebagai berikut :

4.3.1.1. Kesepakatan Awal

Kesepakatan awal ini bertujuan untuk mengkaji apa yang paling dibutuhkan masyarakat pada saat ini dalam hal pembangunan gampong baik itu sarana maupun pengembangan SDM masyarakat gampong yang ada di Alue Seuralen . Berdasarkan teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dimana didapatkan bahwa gambaran konsep penggunaan Gampong di atas sangatlah panjang sekali, penjelasan di atas sedikit menggambarkan mekanisme sebelum menggunakan dana Gampong, kemudian dari pertanyaan ini peneliti mendapatkan informasi dari Keuchik Gampong Alue mengatakan bahwa:

“Kesepakatan awal adalah dengan adanya partisipasi baik dari pihak pemeritahan gampong beserta jajaran nya sampai ke masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan digampong alue seuralen dan mengedepankan setiap kebutuhan dari masyarakat dengan harapan agar dapat terciptanya keadilan dan rasa kesetaraan dalam gampong agar dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakat yang bersifat urgent”.
(Hasil Wawancara 5/04/2021)

M.tahir selaku Tuha Peut Gampong Alue Seuralen membenarkan yang apa yang sudah dikatakan oleh Keuchik Kita Bahwa:

“Dalam segi kesepakatan awal Kesepakatan awal adalah dengan adanya partisipasi dilibatkan dan melibatkan diri baik dari pihak pemeritahan gampong beserta jajaran nya sampai ke masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan digampong alue seuralen dan mengedepankan setiap kebutuhan dari masyarakat dengan harapan agar dapat terciptanya keadilan dan rasa kesetaraan dalam gampong agar dapat memenuhi setiap kebutuhan masyarakat yang bersifat urgent seperti yang tertuang dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 pada pasal 78 ayat 2-3. (Hasil Wawancara Minggu, 06/04/2021)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Busman salah satu masyarakat Alue Seuralen beliau mengatakan:

“Masyarakat punya perwakilan dusun gampong dan Lembaga Tuha Peut, dimana kepala dusun menjelaskan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dusun dan apa yang menjadi prioritas utama untuk kita naikkan atau kita jalankan seperti penggarapan jalan yang menggarab juga masyarakat, setelah mendengar usulan tersebut baru kita melakukan kesepakatan dengan melibatkan tuha Peut dalam pengambilan keputusan setelah itu baru kami buat musrembang , hasil musrembang baru kami naikkan ketingkat kecamatan untuk musrembang Kecamatan”. (Hasil Wawancara, 07/04/2021)

Ramli salah satu masyarakat Alue Seuralen serupa berpendapat bahwa :

“Kesepakatan awal seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Dimana masyarakat bisa langsung mengusulkan apa yang mereka inginkan untuk pembangunan gampong kita ini kesepakatan awal ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana Gampong ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat seluruhnya”. (Hasil Wawancara, 07/4/2021)

Nuraini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Kesepakatan awal ini bertujuan untuk melibatkan segenap masyarakat untuk membangun gampong, menurut saya kesepakatan awal ini sangat perlu dilakukan supaya tidak ada rasa curiga antara masyarakat dengan aparat gampong dan kesepakan awal seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat bisa leluasa menyampaikan aspirasinya kepada aparat gampong dan tuha peut gampong, sehingga apa yang di bangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bersama ”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Saudah salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Kesepakatan awal ini dilakukan agar masyarakat bisa leluasa menyampaikan aspirasinya kepada aparat gampong dan tuha peut gampong, sehingga apa yang di

bangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bersama ”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Rini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Kesepakatan awal ini dilakukan supaya tidak ada rasa curiga antara masyarakat dengan aparat gampong dan kesepakatan awal seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat bisa leluasa menyampaikan aspirasinya kepada aparat gampong dan tuha peut gampong, sehingga apa yang di bangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bersama ”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Basri masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “Kesepakatan awal ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada aparat gampong dan tuha peut gampong, sehingga apa yang di bangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bersama ”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Berdasarkan hasil wawancara Dilihat dari penjelasan di atas maka secara garis besar kesepakatan awal dalam pembangunan Gampong adalah sama. Secara konsep dari Gampong di Alue Seuralen di atas tidak jauh berbeda, karena dasarnya sudah jelas yaitu Peraturan Menteri. Perjalanan untuk penggunaan Gampong sangatlah panjang, pelibatan masyarakat sangatlah penting untuk menentukan program yang akan dilakukan, aspirasi, ide dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan dari keuchik agar program Gampong bisa tepat sasaran, tidak kalah penting adalah keputusan dari keuchik melalui kadus menyikapi usulan-usulan masyarakat, Keuchik sebagai penengah harus mempunyai strategi penggunaan dana Gampong guna tepat sasaran.

4.3.1.2. Perumusan Visi dan Misi

Pembangunan Gampong bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong yang kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Maka perlu adanya perumusan visi dan misi yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan gampong supaya arah kebijakan sesuai dengan misi yang diinginkan oleh gampong, sebagai mana hasil penelitian yang telah dilakukan dimana berdasarkan informasi dari Keuchik Gampong Alue Seuralen mengatakan bahwa:

“Iya, pihak pemerintahan gampong selalu mengupayakan agar masyarakat agar selalu ikut dalam berbagai kegiatan yang ada di gampong aue seuralen. Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari baik dari segi internal maupun eksternal tetapi permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan yang bersifat internal karena banyaknya perbedaan pendapat yang terkadang tidak sesuai dengan SOP yang ada digampong itu mengakibatkan permasalahan internal. permasalahan ini sangat sulit untuk diselesaikan karena permasalahan ini tidak pernah timbul didepan umum melainkan dengan cara masyarakat pada umumnya yaitu selalu berani diluar forum musyawarah”. (Hasil Wawancara 5/04/2021)

M. Tahir selaku Tuha Peut Gampong Alue Seuralen membenarkan yang apa yang sudah dikatakan oleh Keuchik Kita Bahwa:

“Selama ini pihak pemerintahan gampong telah mengupayakan agar masyarakat dapat lebih melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan digampong alue seuralen akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan secara efektif sehingga masyarakat masih enggan untuk melibatkan diri mereka. (Hasil Wawancara, 06/04/2021)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Busman salah satu masyarakat Alue Seuralen beliau mengatakan:

“Keseriusan dalam membangun gampong dilakukan kerjasama untuk proses pembangunan dan kami selaku orang yang sudah di percaya sepenuhnya oleh masyarakat, tuha peut, dan seluruh masyarakat selalu melakukan musyawarah bersama untuk merencanakan pembangunan supaya kami sebagai mana yang sudah direncanakan sebelumnya”. (Hasil Wawancara, 07/04/2021)

Ramli salah satu masyarakat Alue Seuralen serupa berpendapat bahwa :

“visi misi yang sudah dibuat oleh aparat belum sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, yang artinya aparat banyak kelalaian dalam menjalankan tugas mereka yang sehingga masyarakat dan pembangunan yang ada di terbengkalai. “Kebijakan pembangunan di dasarkan kepada pembangunan sarana dan prasaranan untuk peningkatan perekomonian masyarakat yang didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga didapatkan berbagai strategi umum pembangunan yang menghasilkan program- program pokok pembangunan”. (Hasil Wawancara, 07/4/2021)

Nuraini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Bahwa visi misi Gampong lebih pada Pengembangan SDM dimana masyarakat menjadi tolak ukur dalam dalam membangun sendiri. Selain itu dukungan dan kerja keras aparat yang sudah optimal dalam kinerja dalam bertugas sebagai aparat sehingga masyarakat sama pemikiran dalam pengembangan dan pembangunan gampong”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Saudah salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Serupa berpendapat bahwa Gampong Alue Seuralen memiliki pemberdayaan pembangunan masyarakat guna untuk mendukung terwujudnya pemberdayaan yang terbesar di Alue Seuralen”. (Hasil Wawancara 08/04/2021)

Rini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“adanya kerjasama untuk proses pembangunan dan kami selaku orang yang sudah di percaya sepenuhnya oleh masyarakat , tuha peut, dan seluruh masyarakat selalu melakukan musyawarah bersama untuk merencanakan pembangunan supaya kami sebagai mana yang sudah direncanakan sebelumnya ”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Basri masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “Kebijakan pembangunan di dasarkan kepada pembangunan sarana dan prasaranan untuk peningkatan perekomonian masyarakat yang didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga didapatkan berbagai strategi umum pembangunan yang menghasilkan program-program pokok pembangunan ”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa visi dan misi yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan gampong bertujuan untuk pengambilan arah kebijakan yang sesuai dengan misi yang diinginkan oleh masyarakat gampong yang ada di Gampong Alue Seuralen .

4.3.1.3. Analisis Kondisi Internal

Bapak Keuchik Gampong Alue Seuralen mengatakan bahwa:

“Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari baik dari segi internal maupun eksternal tetapi permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan yang bersifat internal karena banyaknya perbedaan pendapat yang terkadang tidak sesuai dengan SOP yang ada di gampong itu mengakibatkan permasalahan internal. permasalahan ini sangat sulit untuk diselesaikan karena permasalahan ini tidak pernah timbul di depan umum melainkan dengan cara masyarakat pada umumnya yaitu selalu berani diluar forum musyawarah”. (Hasil Wawancara 5/04/2021)

M. tahir selaku Tuha Peut Gampong Alue Seuralen Bahwa:

“Permasalahan internal memang sering terjadi ini dikarenakan pendapat yang pernah diajukan oleh masyarakat sering diabaikan dan pada saat tersebut tidak ada klarifikasi yang jelas kenapa pendapat dari masyarakat ini tidak diterima oleh pihak pemerintahan gampong alue seuralen dan menimbulkan permasalahan batin antara masyarakat dengan aparat desa tersebut. karena pada dasarnya tujuan dari pembangunan desa adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri tetapi yang terjadi berbanding terbalik dengan hal tersebut. (Hasil Wawancara Minggu, 06/04/2021)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Busman salah satu masyarakat Alue Seuralen beliau mengatakan:

“Menurut saya kondisi internal perlu diperkuat dimana setiap kaur-kaur yang ada di gampong harus kompak dan tau tupoksi atau tugas kerja masing-masing, kalau itu sudah mereka lakukan kekompakan dan kondisi internal tidak akan ada konflik seperti Gampong kami

sekarang ini kami selalu menjaga keharmonisan antar aparaturnya dan tuha peut gampong sehingga kondisi internal kami selalu terjaga setiap waktu”. (Hasil Wawancara, 07/04/2021)

Ramli salah satu masyarakat Alue Seuralen serupa berpendapat bahwa :

“Kondisi Internal merupakan hal yang mutlak yang harus kami lestarikan, apabila kondisi internal ini baik maka baiklah pembangunan sebuah gampong namun sebaliknya jika kondisi ini kurang baik atau harmonis maka Gampong tersebut jangan dianggap akan berhasil pembangunannya, maka dari itu kami selaku tuha peut gampong selalu menjalin kekompakan dengan aparaturnya dan masyarakat gampong dengan tujuan adanya keharmonisan antara masyarakat, pemerintahan gampong dan kami selaku tuha peut Gampong”. (Hasil Wawancara, 07/4/2021)

Nuraini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Kondisi internal harus selalu kita perkuat dimana kondisi internal tersebut memegang peran penting dalam maju mundurnya sebuah Gampong. Kami disini selalu kompak baik dengan sesama aparaturnya maupun dengan unsur tuha peut, walaupun ada perbedaan itu merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, kritikan dan saran tetap kami terima demi memajukan dan mengembangkan gampong kearah yang lebih baik”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Saudah salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :“Kondisi Internal mencerminkan baik buruknya sebuah Gampong apabila kita ingin melihat perkembangan gampong maka lihatlah kondisi internal dari gampong itu”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa analisis kondisi internal pemerintahan gampong dalam pembangunan gampong diantaranya adalah sudah bisa dikatakan baik dimana setiap persoalan dimusyawarahkan secara bersama-sama.

4.3.1.4.Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal gampong berdasarkan informasi dari Keuchik Gampong

Alue Seuralen mengatakan bahwa: “Tidak pernah, selama ini tidak pernah ada kritik dan saran dari masyarakat mengenai program pembangunan di gampong alue seuralen”. (Hasil Wawancara 5/04/2021)

M.Tahir selaku Tuha Peut Gampong Alue Seuralen membenarkan yang apa yang sudah dikatakan oleh Keuchik Kita Bahwa: “Secara eksternal tidak pernah terjadi konflik antara tuha peut, aparat gampong dan masyarakat. (Hasil Wawancara Minggu, 06/04/2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Busman salah satu masyarakat Alue Seuralen beliau mengatakan :“Menurut sepengetahuan saya kondisi eksternal di gampong kami sudah maksimal hal ini disebabkan banyaknya kerja sama dengan pihak swasta, selain itu pihak pendamping sering datang ketempat kami dalam apabila diperlukan dalam hal pengembangan gampong”. (Hasil Wawancara, 07/04/2021)

Ramli salah satu masyarakat Alue Seuralen serupa berpendapat bahwa : “Menurut saya kondisi eksternal di gampong sebagaimana dikatakan keuchik tadi yaitu sudah maksimal, selain itu pihak pendamping sering datang ketempat kami untuk memantau situasi gampong””. (Hasil Wawancara, 07/4/2021)

Nuraini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “Kalau kondisi eksternal sudah baik disebabkan sudah adanya kerja sama dengan pihak swasta, pendamping sering melakukan kunjungan dan tanyakan kondisi pembangunan gampong yang telah dilakukan selama ini”(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Saudah salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Dalam gampong kami tidak ada terjadi masalah sehingga pembangunan gampong yang di rencanakan bersama dengan masyarakat, terlaksana sesuai yang kita inginkan karena masih SDM yang berada di gampong kami sudah lumayan bagus”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Rini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Kalau kondisi eksternal sudah baik adanya kerjasama untuk proses pembangunan, merencanakan pembangunan supaya kami sebagai mana yang sudah direncanakan sebelumnya ”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Basri masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “kondisi eksternal di gampong sebagaimana dikatakan keuchik tadi yaitu sudah maksimal, selain itu pihak pendamping sering datang ketempat kami untuk memantau situasi gampong”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa analisis kondisi eksternal pemerintahan gampong dalam pembangunan gampong diantaranya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM) dalam mengelola segala bidang pembangunan di Gampong, meningkatkan kondisi eksternal dengan stekholder lainnya dalam menata pembangunan gampong yang lebih maju dan modern.

4.3.2. Kendala dalam Pembangunan

Faktor kendala merupakan sesuatu hal yang menjadi persoalan dalam menjalankan misi pada suatu daerah/Gampong sehingga berimbas pada pembangunan.

4.3.2.1.Faktor Internal

Sebagaimana hasil wawancara Keuchik Gampong Alue Seuralen mengatakan bahwa:

“Kendala internal yang mempengaruhi tingkat partisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan digampong alue seuralen adalah lemahnya semangat dalam berpartisipasi, kesadaran, maupun kemampuan individu yang dimiliki yang mengakibatkan mereka enggan untuk kritik dan sarannya kepada pihak pemerintahan gampong alue seuralen”. (Hasil Wawancara 5/04/2021)

M. Tahir selaku Tuha Peut Gampong Alue Seuralen membenarkan yang apa yang sudah dikatakan oleh Keuchik Kita Bahwa:

“Secara internal tidak pernah terjadi konflik ini dikarenakan di gampong alue seuralen merupakan induk keluarga besar jadi masyarakat tidak ingin permasalahan didalam gampong akan berimbas dalam hubungan kekeluargaan mereka sendiri. (Hasil Wawancara Minggu, 06/04/2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Busman salah satu masyarakat Alue Seuralen beliau mengatakan:

“Kalau dalam segi faktor penghambat Internal kami kurang tahu karena tugas kami hanya mengawasi pembangunan dan kinerja aparatur gampong, apakah mereka sudah menjalankan sesuai dengan Undang-undang dan Qanun Provinsi Aceh”. (Hasil Wawancara, 07/04/2021)

Ramli salah satu masyarakat Alue Seuralen serupa berpendapat bahwa :

“faktor penghambat Internal kami kurang tahu karena tugas kami hanya mengawasi pembangunan dan kinerja aparatur gampong, apakah mereka sudah menjalankan sesuai dengan Undang-undang dan Qanun Provinsi Aceh”. (Hasil Wawancara, 07/4/2021)

Nuraini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Secara internal tidak pernah terjadi konflik ini dikarenakan di gampong alue seuralen merupakan induk keluarga besar jadi masyarakat tidak ingin permasalahan didalam gampong akan berimbas dalam hubungan kekeluargaan mereka sendiri”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Saudah salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “faktor penghambat Internal kami kurang tahu karena tugas kami hanya mengawasi pembangunan”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Rini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “faktor penghambat Internal kami kurang tahu”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Basri masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “faktor penghambat Internal kami kurang tahu karena tugas kami hanya mengawasi pembangunan, sudah maksimal, selain itu pihak pendamping sering datang ketempat kami untuk memantau situasi gampong”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat dalam pembangunan gampong diantaranya adalah Secara eksternal tidak pernah terjadi konflik ini dikarenakan di gampong alue seuralen merupakan induk keluarga besar jadi masyarakat tidak ingin permasalahan didalam gampong akan berimbas dalam hubungan kekeluargaan mereka sendiri.

4.3.2.2. Faktor eksternal

Sebagaimana hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Alue Seuralen yaitu Keuchik Gampong Alue mengatakan bahwa:

“Secara eksternal tidak pernah terjadi konflik antara tuha peut,aparatur gampong dan masyarakat. Masyarakat sangat kurang terlibat dalam pengawasan pembangunan digampong alue seuralen, sampai terkadang geuchik datang kerumarah masyarakat untuk mengajak masyarakat agar bisa melihat dan mengawasi setiap pembangunan yang ada digampong”.
(Hasil Wawancara 5/04/2021)

M.tahir selaku Tuha Peut Gampong Alue Seuralen membenarkan yang apa yang sudah dikatakan oleh Keuchik Kita Bahwa:

“Secara eksternal tidak pernah terjadi konflik ini dikarenakan di gampong alue seuralen merupakan induk keluarga besar jadi masyarakat tidak ingin permasalahan didalam gampong akan berimbas dalam hubungan kekeluargaan mereka sendiri. (Hasil Wawancara Minggu, 06/04/2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Busman salah satu masyarakat Alue Seuralen beliau mengatakan:

“Faktor penghambat eksternal dalam pembangunan gampong diantaranya adalah lambatnya turun anggaran pembangunan sehingga berimbas pada kesiapan pembangunan misalnya program pembangunan kami ajukan pada bulan mei namun anggaranya baru turun pada bulan juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat proses pekerjaannya. Apabila pembangunan yang kami ajukan berskala kecil mungkin sesuai target yang telah di rencanakan, namun jika skala menengah belum bisa dipastikan akan selesai dengan target yang telah ditentukan”. (Hasil Wawancara, 07/04/2021)

Ramli salah satu masyarakat Alue Seuralen serupa berpendapat bahwa :
 “Faktor pengambat pembangunan sebagaimana yang telah di katataka pak keuchik tadi lambatnya turun anggaran pembangunan sehingga kesiapan pembangunan jadi lambat”. (Hasil Wawancara, 07/4/2021)

Nuraini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Faktor penghambat dari luar atau eksternal dalam pembangunan gampong diantaranya adalah lamanya turun anggaran pembangunan sehingga pembangunan yang direncanakan jadi terkendala misalnya program pembangunan diajukan pada bulan mei namun anggaranya baru cair pada bulan juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat proses pekerjaann”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Saudah salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “faktor penghambat Eksternal kami kurang tahu karena tugas kami hanya mengawasi pembangunan ”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Rini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “faktor penghambat kami kurang tahu”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Basri masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “faktor penghambat Internal kami kurang tahu karena tugas kami hanya mengawasi pembangunan, sudah maksimal, selain itu pihak pendamping sering datang ketempat kami untuk memantau situasi gampong”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat eksternal dalam pembangunan gampong diantaranya adalah Faktor penghambat dari luar atau eksternal dalam pembangunan gampong diantaranya adalah lamanya turun anggaran pembangunan sehingga pembangunan yang direncanakan jadi terkendala misalnya program pembangunan diajukan pada bulan mei namun anggaranya baru cair pada bulan juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat proses pekerjaannya.

4.3.2.3. Kebijakan Program

Bapak Keuchik Gampong Alue Seuralen mengatakan bahwa:

“Menurut saya selama ini tingkat pencapaian dalam pembangunan digampong sudah BAIK, tetapi belum mencapai tingat yang sangat baik. Ini dikarenakan berbagai faktor dan kendala yang terjadi pada saat proses perencanaan pembangunan sampai ke tahap pelaksanaan dari program yang telah direncanakan baik dari factor keaktifan masyarakat, factor alam sampai ke faktor aministrasi gampong. Faktor keaktifan masyarakat yaitu masih sangat kurang baik dari pemberian pendapat dan juga terkadang pendapat yang di sampaikan terkadang juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, faktor alam seperti pada saat pelaksanaan program pembangunan digampong sangat sering terjadinya banjir yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan yang akan tidak selesai tepat waktu dan terkadang juga mengalami kerugian material yang tidak mungkin dipindahkan pada saat banjir seperti kerikil,tanah,semen,kayu,dan pasir.dan dari faktor administrasi adalah terkadang lambatnya proses administrasi dalam pencairan dana untuk program pembangunan”. (Hasil Wawancara 5/04/2021)

M.tahir selaku Tuha Peut Gampong Alue Seuralen membenarkan yang apa yang sudah dikatakan oleh Keuchik Kita Bahwa:

“Secara umum keterbukaan dalam anggaran dan pendapatan desa ini masih kurang ini dibuktikan tidak adanya spanduk atau poster keterbukaan anggaran seperti gampong-gampong pada umumnya, dan jika ada masyarakat yang menanyakan tentang anggaran pendapatan gampong pihak yang berwenang (bendahara) gampong hanya menjelaskan secara singkat tanpa memberikan bukti administrasi dari program pembangunan gampong tersebut. (Hasil Wawancara Minggu, 06/04/2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Busman salah satu masyarakat Alue Seuralen beliau mengatakan:

“Dalam segi kebijakan program kami kurang tahu namun sepengetahuan saya mereka harus mengacu pada peraturan menteri dan peraturan bupati Aceh Barat tentang mekanisme pengelolaan dana”. (Hasil Wawancara, 07/04/2021)

Ramli salah satu masyarakat Alue Seuralen serupa berpendapat bahwa :

“Dalam segi kebijakan program kami kurang tahu namun sepengetahuan saya mereka harus mengacu pada kepentingan masyarakat seluruhnya”. (Hasil Wawancara, 07/4/2021)

Nuraini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “Dalam segi kebijakan program kami kurang tahu namun sepengetahuan saya mereka harus mengacu pada kepentingan masyarakat seluruhnya”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Saudah salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Kebijakan program kami kurang tahu namun sepengetahuan saya mereka harus mengacu pada kepentingan masyarakat seluruhnya”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Rini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “kebijakan program kami kurang tahu namun sepengetahuan saya mereka harus mengacu pada kepentingan masyarakat gampong”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Basri masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa : “Secara umum keterbukaan dalam anggaran dan pendapatan desa ini masih kurang ini dibuktikan tidak adanya spanduk atau poster keterbukaan anggaran”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan program dalam pembangunan Gampong di Alue Seuralen Kabupaten Aceh Barat berdasarkan hasil kesepakatan antara masyarakat, aparat gampong dan persetujuan lembaga tuha peut yang dituangkan dalam RPJMG (rencana pembangunan jangka menengah Gampong) yaitu program satu periode, selanjutnya RKPG (rencana kerja pemerintah Gampong) program tahunan, kemudian APBG, (anggaran pendapatan dan belanja Gampong).

4.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat

Bapak Keuchik Gampong Alue Seuralen mengatakan bahwa:

‘Secara umum keterbukaan dalam anggaran dan pendapatan desa ini masih kurang ini dibuktikan tidak adanya spanduk atau poster keterbukaan anggaran seperti gampong-gampong pada umumnya, dan jika ada masyarakat yang menanyakan tentang anggaran pendapatan gampong pihak yang berwenang (bendahara) gampong hanya menjelaskan secara singkat tanpa memberikan bukti administrasi dari program pembangunan gampong tersebut’. (Hasil Wawancara 5/04/2021)

M.tahir selaku Tuha Peut Gampong Alue Seuralen membenarkan yang apa yang sudah dikatakan oleh Keuchik Kita Bahwa:

“Disini ada masyarakat yang terlibat tetapi masih sangat kurang terlibat dikarenakan pada proses tahapan awal tadi saat mereka memberikan masukan pihak pemerintahan gampong kurang menanggapinya yang mengakibatkan mereka malas untuk terlibat dalam pengawasan tersebut. (Hasil Wawancara Minggu, 06/04/2020)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Busman salah satu masyarakat Alue Seuralen beliau mengatakan:

“Masyarakat pernah memberikan kritik dan saran kepada pihak pemerintahan gampong alue seuralen namun pihak tersebut kurang mengindahkan kritik dan saran dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat untuk terkadang memilih diam dan terkadang mereka hanya membicarakan kritik dan saran nya dengan sesama masyarakat yang tidak terlibat”. (Hasil Wawancara, 07/04/2021)

Ramli salah satu masyarakat Alue Seuralen serupa berpendapat bahwa :

“Disini ada masyarakat yang terlibat tetapi masih sangat kurang terlibat dikarenakan pada proses tahapan awal tadi saat mereka memberikan masukan pihak pemerintahan gampong kurang menanggapinya yang mengakibatkan mereka malas untuk terlibat dalam pengawasan tersebut”. (Hasil Wawancara, 07/4/2021)

Nuraini salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Masyarakat pernah memberikan kritik dan saran kepada pihak pemerintahan gampong alue seuralen namun pihak tersebut kurang mengindahkan kritik dan saran dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat untuk terkadang memilih diam dan terkadang mereka hanya membicarakan kritik dan saran nya dengan sesama masyarakat yang tidak terlibat”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Saudah salah satu masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :

“Masyarakat bisa leluasa menyampaikan aspirasinya kepada aparat gampong dan tuha peut gampong, sehingga apa yang di bangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bersama”.(Hasil Wawancara 08/04/2021) Basri masyarakat Alue Seuralen berpendapat bahwa :
 “Secara umum keterbukaan dalam anggaran dan pendapatan desa ini masih kurang ini dibuktikan tidak adanya spanduk atau poster keterbukaan anggaran”.(Hasil Wawancara 08/04/2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan program dalam pembangunan Gampong di Alue Seuralen Kabupaten Aceh Barat berdasarkan hasil kesepakatan antara masyarakat, aparatur gampong dan persetujuan lembaga tuha peut yang dituangkan dalam RPJMG (rencana pembangunan jangka Menengah Gampong) yaitu program satu periode, selanjutnya RKPG (rencana kerja pemerintah Gampong) program tahunan, kemudian APBG, (anggaran pendapatan dan belanja Gampong).

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat adalah kesepakatan awal, perumusan visi dan misi, analisis kondisi internal dan eksternal dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa :

5.1.1 Kesepakatan Awal

Secara garis besar kesepakatan awal dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat dengan keterlibatan masyarakat gampong Alue Seuralen belum dijalankan dengan baik artinya setiap persoalan yang di jalakan bukan sepenuhnya hasil dari keinginan masyarakat melainkan hasil dari keputusan pemerintahan gampong sepenuhnya sehingga sarana dan prasarana yang ada di gampong belum memiliki kesetaraan dalam pembangunan gampong yang sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya. Seharusnya tingkat partisipasi masyarakat sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Desa dimana Perjalanan untuk pembangunan Gampong sangatlah panjang, pelibatan masyarakat sangatlah penting untuk menentukan program yang akan dilakukan, aspirasi, ide dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan dari Keuchik agar program Keuchik bisa tepat sasaran

atau tidak, tidak kalah penting adalah keputusan dari Keuchik menyikapi usulan-usulan masyarakat, Keuchik sebagai penengah harus mempunyai strategi penggunaan dana Gampong guna tepat sasaran hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sondang P.Siagian (2011, h.24) dimana perencanaan dalam suatu organisasi memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya diantaranya adalah kesepakatan awal dimana rencana strategi merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara semua aktor yang berkepentingan (*stakeholder*).

5.2.2 Visi dan Misi yang ingin di Capai

Visi dan misi yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan gampong belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat hal ini dilihat dari hasil jawaban responden pada bab sebelumnya yaitu visi misi yang sudah dibuat oleh aparat belum sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, yang artinya aparat banyak kelalaian dalam menjalankan tugas mereka sehingga masyarakat dan pembangunan yang ada di terbengkalai. Hal ini bertolak belakang dengan teori P. Siagian dimana Kebijakan pembangunan di dasarkan kepada pembangunan sarana dan prasaranan untuk peningkatan perekonomian masyarakat yang didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga didapatkan sebagai strategi umum pembangunan yang menghasilkan program- program pokok pembangunan.

Perumusan visi dan misi dimana setiap lembaga atau organisasi diharapkan memiliki visi tertentu yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholder pada masa mendatang atau dalam kurun waktu tertentu setelah lembaga tersebut berjalan. Misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan. Kemudian Perumusan strategi, kebijakan dan program-program strategis, kesalahan yang paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi yang ada dapat terealisasi secara maksimal dan dapat mewujudkan visi yang dirumuskan. Prinsip-prinsip implementasi startegi bagaimana prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka mengimplementasikan program-program yang tersusun di RKPG maupun RPJMG

5.2.3 Analisis kondisi internal dan Eksternal Pemerintahan Gampong

Kajian mengenai kondisi internal pemerintahan gampong dalam pembangunan gampong dilokasi penelitian sudah baik dimana setiap persoalan dimusyawarahkan secara bersama-sama aparatur gampong dan lembaga tuha peut. Sedangkan pada Kajian dalam hal kondisi eksternal Pemerintahan gampong dalam pembangunan gampong diantaranya adalah belum adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola pembagunan gampong. Kebijakan program dalam perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat berdasarkan hasil kesepakatan antara masyarakat, aparatur gampong dan persetujuan lembaga tuha peut yang dituangkan dalam RPJMG (Recana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) yaitu program

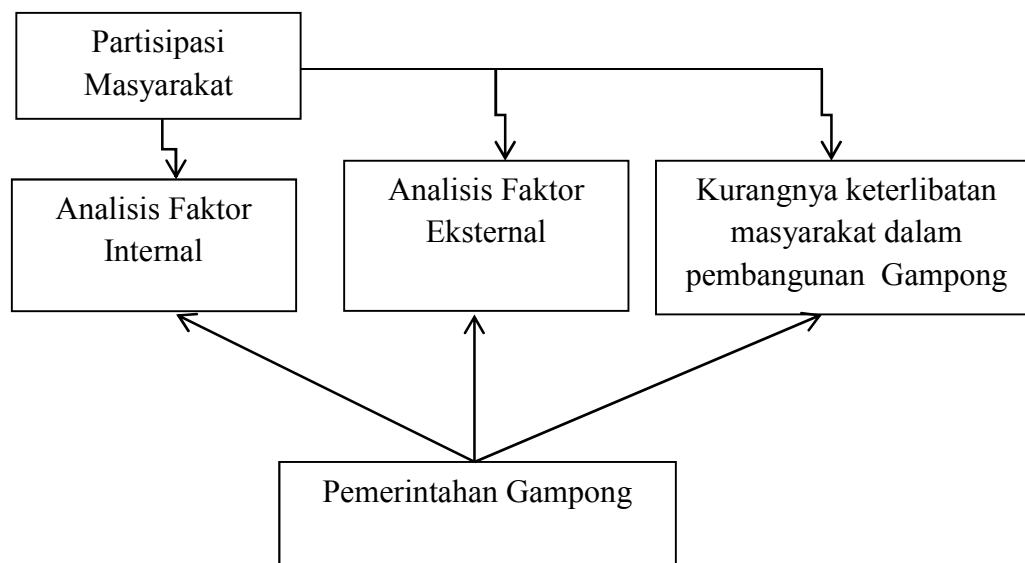
satu periode, selanjutnya RKPG (rencana kerja pemerintah Gampong) program tahunan, kemudian APBG, (anggaran pendapatan dan belanja Gampong).

Hal ini sebagaimana teori P. Siagian yang mengatakan bahwa analisis kondisi internal dilakukan untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan internal, disini diperlukan suatu penilaian tentang kondisi internal yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis kondisi eksternal dilakukan untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan suatu dukungan yang kondusif dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut harus dinilai karena dapat menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa ancaman. Penentuan isu-isu strategi, dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas ditemukan banyak isu dengan tingkat kesetategisan yang berbeda-beda. Disini dibutuhkan suatu ketajaman berfikir untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak.

Pembangunan di gampong memberikan dampak yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat seperti petani tambak, pedagang, wiraswasta, dan lainnya memang merasakan dampak positif dari pembangunan sarana dan prasarana karena mereka lebih mudah menggunakan akses jalan dan jembatan dalam melintasinya untuk bekerja. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan dalam bidangnya merasa diuntungkan karena mendapat pelatihan pelatihan yang dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

Bagan 5.1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat



Tabel. 5.1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat

NO	Perencanaan Pembangunan	Tingkat Partisipasi
1	Kesepakatan Awal	kesepakatan awal dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat dengan keterlibatan masyarakat gampong Alue Seuralen belum dijalankan dengan baik
2	Visi dan Misi yang ingin di Capai	Visi dan misi yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan gampong belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla timur Kabupaten Aceh Barat
3	Analisis kondisi internal dan Eksternal Pemerintahan Gampong	Kondisi internal pemerintahan gampong dalam pembangunan gampong dilokasi penelitian sudah baik dimana setiap persoalan dimusyawarahkan secara bersama-sama aparatur gampong dan lembaga tuha peut. Sedangkan pada Kajian dalam hal kondisi eksternal Pemerintahan gampong dalam pembangunan gampong diantaranya adalah belum adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola pembagunan gampong

Sumber : Analisis Peneliti (2021)

5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat merupakan sesuatu hal yang menjadi persoalan dalam menjalankan misi pada suatu daerah/Gampong sehingga berimbas pada pembangunan.

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diantaranya adalah tidak pernah terjadi konflik ini dikarenakan di Gampong Alue Seuralen merupakan induk keluarga besar jadi masyarakat tidak ingin permasalahan didalam gampong akan berimbas dalam hubungan kekeluargaan mereka sendiri. Kemudian Faktor internal yang mempengaruhi tingkat partisipasi dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan digampong alue seuralen adalah lemahnya semangat dalam berpartisipasi, kesadaran, maupun kemampuan individu yang dimiliki yang mengakibatkan mereka enggan untuk kritik dan sarannya kepada pihak pemerintahan gampong alue seuralen. Kendala eksternal yang sering mempengaruhi masyarakat adalah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memngompori masyarakat agar tidak ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan terkadang berhasil mempengaruhi masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh geuchik gampong alue seralen ini adalah upaya mendorong motivasi masyarakat agar dapat melibatkan diri lebih maksimal kedepannya, dan memberikan kesempatan untuk masyarakat

dalam mengeluarkan ide-ide, kritik, dan sarannya pada saat-saat tertentu seperti pada saat musyawarah tingkat dusun masyarakat diminta untuk mengeluarkan uneg-unegnya selama ini.

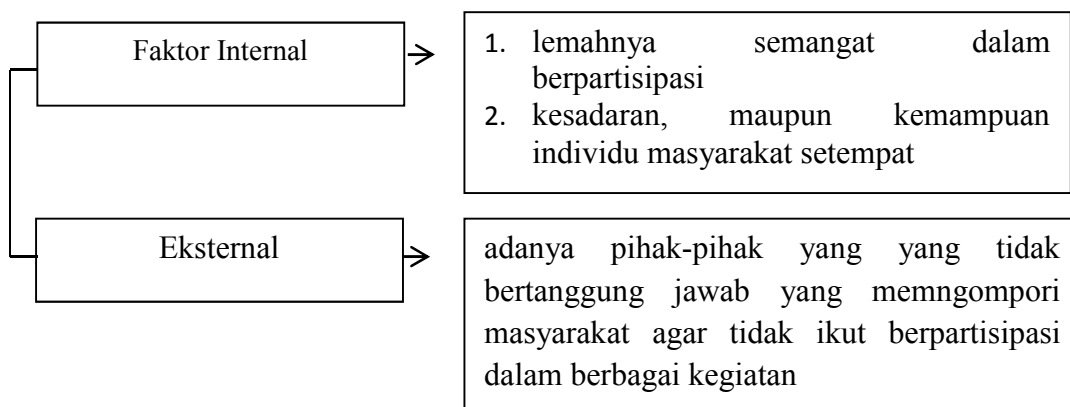
Kemudian Menurut tokoh-tokoh gampong dan juga beberapa masyarakat agar hal ini tidak terjadi atau setidaknya dapat meminimalisirkan pihak pemerintahan gampong itu harus memperkuat aspek kepemimpinan dan mengindahkan setiap peraturan dan juga menyetarakan semua masyarakat tanpa terkecuali, dan kemudian dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat misalnya ada pendapat dari masyarakat yang tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki sehingga dapat dijelaskan dan memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak salah memahaminya dan juga keterbukaan tentang anggaran pendapatan gampong dan tentang pentingnya berpartisipasi agar pihak pemerintahan gampong dapat mengetahui apa saja yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan juga menerima kritik dan saran yang membangun untuk terciptanya keadilan, kedamaian, dan kekeluargaan dalam suatu gampong.

Kaitan Penelitian ini dengan pembangunan Gampong yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, adalah dimana pembangunan itu proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu.

Berdasarkan pembahasan diatas penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Magdalena. Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan peran tersebut yaitu masalah SDM, sumber dana, dan sarana prasarana. maka dapat dinyatakan bahwa optimalisasi peran badan permusyawaratan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dinyatakan dalam kategori cukup baik.

Bagan 5.2

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat belum secara efektif dan maksimal. Visi dan misi yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan gampong belum optimal. Analisis kondisi eksternal pemerintahan gampong belum mendukung dalam segi pembangunan Gampong.
2. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat diantaranya yaitu faktor internal dan eksternal. Kendala internal dalam proses perencanaan pembangunan digampong alue seuralen adalah lemahnya semangat dalam berpartisipasi, kesadaran, maupun kemampuan individu yang dimiliki yang mengakibatkan mereka enggan untuk kritik dan sarannya kepada pihak pemerintahan gampong alue seuralen. Kendala eksternal yaitu adanya pihak-pihak yang yang tidak bertanggung jawab yang memngompori masyarakat agar tidak ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan terkadang berhasil mempengaruhi masyarakat.

5.2 Saran

Setelah peneliti mendapatkan hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran mengenai Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi masalah yang telah dibahas dalam penelitian, perlu adanya tindakan yang serius bagi pemerintahan Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Gampong dalam pembangunan dengan memotivasi mengenai pentingnya pembangunan gampong.
2. Dalam konteks ini juga diharapkan kepada masyarakat Gampong Alue Seuralen untuk lebih kreatif dan antusias dalam proses pembangunan di Gampong karena untuk menciptakan keberhasilan pembangunan dibutuhkan peran serta atau partisipasi masyarakat.
3. Adanya keterbukaan informasi melalui komunikasi antara aparatur gampong dengan masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi permasalahan internal seperti pembangunan yang awalnya direncanakan bersama masyarakat tidak terealisasi.
4. Diharapkan dukungan pemerintah setempat dalam Dalam Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat
5. Diharapkan dukungan pemerintah melalui pemberian pelatihan dan seminar untuk menunjang perkembangan pembangunan gampong yang ada Di Kabupaten Aceh Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Cetakan Pertama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: KOMPIS Solo
- HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press
- Martani dan Lubis, 1987. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta
- Miles dan Huberman, 2007. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* : Bandung : Remaja Rosydakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2009. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Noor. 2011, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Richard, M. Steers, 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Media Group.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, 2006. *Tingkat kesejahteraan sosial*. Jakarta : Pustaka Utama.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

JURNAL/SKRIPSI

Aprilia, 2018. Efektivitas penggunaan anggaran Desa Tahun 2017 terhadap pembangunan Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Jurnal, Fakultas Fisip UTU. Aceh Barat.

Feiby, 2017. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Lampiran 1

DOKUMENTASI WAWANCARA



Keuchik Gampong Alue Seuralen



M. Tahir Tuha Pet Gampong Alue



Basri Masyarakat Gampong Alue



Ramli Masyarakat Gampong Alue



Rini Masyarakat Gampong Alue



Saudah Masyarakat Gampong Alue



Busman Masyarakat Gampong Alue



Nuraini Masyarakat Gampong Alue

DOKUMENTASI RAPAT GAMPONG



BIODATA

Nama : RESI AYU SANTIA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Menuang Kinco, 06 September 1999

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur
Kabupaten Aceh Barat

Nama Orang Tua

- a. Ayah : M. YUSUF. FD
- b. Ibu : LISNIATI
- c. Pekerjaan : Tani
- d. Alamat : Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur
Kabupaten Aceh Barat

Pendidikan Formal

SD (2005 - 2011) : SD Negeri Blang Luah


SLTP (2011 - 2014) : SMP Negeri 3 Woyla Timur

SMA (2014 - 2017) : SMA Negeri 1 Woyla

Perguruan Tinggi : Fakultas FISIP Jurusan Administrasi
Negara Tahun masuk 2017

Aceh Barat, 22 Juni 2021

Penulis


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
 Laman : fisip.uta.ac.id, e-mail : fisip@uta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 616/UN59.S/HK.04/2020
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA RESI AYU SANTIA NIM 1705905010006
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA RESI AYU SANTIA NIM 1705905010006 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

KESAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id


KESATU : Menunjuk Sri Wahyu Handayani, MA sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Resi Ayu Santia NIM 1705905010006 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.

KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 16 November 2020
An. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
POLITIK

Basri
NIP 196307131991021002

Keputusan :
1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 KAMPUS UTU MULLABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
 Laman : flsp.utu.ac.id, e-mail : flsp@utu.ac.id

Nomor : 489/UN59.5/KM/2021

20 April 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
 Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth.

Geuchik Gampong Alue Seuralen, Kec. Woyla Timur, Kab. Aceh Barat

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Resi Ayu Santia
NIM	: 1705905010006
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	: "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 Di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat"
Pembimbing	: Sri Wahyu Handayani, MA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan

 Dr. Alrizal Tjoetra, M. Si
 NIDN 01-01110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN WOYLA TIMUR
GAMPONG ALUE SEURALEN**

Nomor : 100/ / 2021
Lampiran : 1 Eks
Perihal : Hasil penelitian

Kepada Yth :
Bapak Dekan
Cq Ketua Jurusan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Teuku Umar
di _____
Tempat _____

1. Sehubungan dengan surat pengantar dari Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar perihal Pengumpulan data dalam rangka penyelesaian karya akhir (Skripsi), maka dari itu kami dari Pemerintahan Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat telah memberikan data dan informasi yang diperlukan mahasiswa tersebut.

Nama	: RESI AYU SANTIA
NIM	: 1705905010006
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 Di Gampong Alue Seuralen Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat

2. Demikian kami sampaikan yang tersebut nama diatas telah melakukan penelitian pada tempat kami, dan semoga surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Alue Seuralen
Pada Tanggal : 08 April 2021
Kepala Kelurahan / Keuchik Gampong Alue Seuralen
Kecamatan Woyla Timur Kab. Aceh Barat


RASBALLAH

